

ABSTRAK

**DIRGA WAHYUDI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PERANGKAT DESA
Nim: 190510128 PAYA BILI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum
Kota Lhokseumawe)
(Johari, S.H., M.H dan Ferdy Saputra, S.H., M.H)**

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki ketentuan terkait pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi yang terjadi dalam perangkat desa yang memiliki tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, adanya kasus yang melibatkan aparatur desa Paya Bili menjadikan pengelolaan keuangan desa perlu untuk di kawal serta diawasi agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa yang menyebabkan tindak pidana Korupsi yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informen dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di desa paya bili kecamatan muara dua kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe mengalami kendala non yuridis seperti terpidana Jefri tidak menanggapi surat panggilan dari pihak kepolisian untuk di periksa terkait laporan tindak pidana korupsi. Selanjutnya terdapat Kendala yuridis yang terletak pada terpidana Jefri tidak mampu dan tidak memiliki harta untuk membayar ganti kerugian Negara terkait dengan kasus korupsi tersebut yang menyebabkan Negara mengalami kerugian APBD senilai 276.626.091.01 akibat dari itu terpidana Jefri diberikan pidana pokok selama 5 tahun penjara dan pidana tambahan (Restitusi) selama 3 bulan penjara. Kendala berikutnya terkait implimentasi hukum belum berjalan secara maksimal karena kurangnya jumlah personil jaksa dalam menangani kasus serta masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan larangan korupsi pada kenyataannya masih banyak nya oknum yang melakukan korupsi.

Disarankan kepada pemerintah daerah kota Lhokseumawe dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harusnya berperan aktif dalam memperbaiki pola fikir masyarakat, khususnya pola fikir aparatur desa untuk tidak melakukan korupsi. dan kepada pihak pengadilan untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang *intens* terkait pengawasan.

Kata Kunci: korupsi, Tindak Pidana, Perangkat Desa, Penegak Hukum

ABSTRACT

**DIRGA WAHYUDI ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION
OF VILLAGE APPARATUS PAYA BILI
Nim: 190510128 (Jurisdiction of Lhokseumawe City)
(Johari, S.H., M.H and Ferdy Saputra, S.H., M.H)**

Law enforcement process against corruption crimes has provisions related to the provision of strict sanctions for perpetrators of corruption that occur in the village apparatus which has the aim of providing a deterrent effect on the perpetrators of these corruption crimes, there are cases involving village apparatus. supervised in order to avoid misuse of village funds by village officials that cause corruption crimes contrary to law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Type of research is empirical legal research by conducting interviews directly with information and respondents. The nature of the study is analytical descriptive, namely describing law enforcement against the criminal act of village fund corruption that occurred in paya bili village, muara dua district, Lhokseumawe city.

The results showed that law enforcement efforts against corruption in Paya Bili village, Muara Dua District, Lhokseumawe City experienced non-juridical obstacles, such as the convicted Jefri did not respond to summons from the police to be examined regarding reports of corruption crimes. Furthermore, there is a juridical obstacle that lies in the convicted Jefri being unable and not having the property to pay state compensation related to corruption cases.

The corruption caused the State to suffer APBD losses worth 276,626,091.01 as a result of which the convicted Jefri was given a sentence of 5 years in prison and an additional sentence of 3 months in prison. The next obstacle related to legal implementation has not run optimally due to the lack of prosecutor personnel in handling cases and the low legal awareness in the community related to the prohibition of corruption, in fact there are still many individuals who commit corruption.

Recommended that the local government of Lhokseumawe city in handling cases of corruption should play an active role in improving the mindset of the community, especially the mindset of village officials not to commit corruption. and to the procuratorate to further improve the intense coordination and cooperation related to supervision.

Keywords: Corruption, Crime, Village Apparatus, Law Enforcement